

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, serta pemerataan hasil pembangunan di berbagai sektor dan wilayah. Pembangunan ekonomi tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka produksi, tetapi juga mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam menciptakan transformasi struktural yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi menjadi cerminan utama dari keberhasilan pembangunan, karena menunjukkan peningkatan kapasitas produksi dan kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan dari proses pembangunan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemajuan suatu negara atau wilayah. Namun dalam praktiknya, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur tidak selalu merata antar wilayah. Beberapa daerah mungkin mengalami pertumbuhan yang cepat, sementara wilayah lain tetap tertinggal. Ketidakmerataan ini menimbulkan isu penting dalam pembangunan ekonomi, terutama terkait pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional atau *output* per kapita dalam jangka panjang. Menurut penelitian oleh Kurniawan *et al.*, (2021), mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi mencakup perubahan kondisi ekonomi suatu negara menuju keadaan yang lebih baik melalui peningkatan kapasitas produksi yang dicapai melalui peningkatan pendapatan nasional.

Fenomena ini mendorong munculnya konsep konvergensi pertumbuhan ekonomi, yaitu proses di mana wilayah atau negara yang memiliki tingkat pendapatan rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan wilayah yang berpendapatan tinggi, sehingga kesenjangan antar wilayah perlahan mengecil. Sedangkan divergensi pertumbuhan ekonomi terjadi ketika daerah atau negara dengan pendapatan per kapita rendah tumbuh lebih lambat daripada daerah atau negara dengan pendapatan per kapita tinggi, sehingga kesenjangan pendapatan antar wilayah semakin melebar dari waktu ke waktu.

Konvergensi secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu konvergensi sigma dan konvergensi beta. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Haslinda & Arapi (2004), konvergensi sigma digunakan untuk mengukur sejauh mana kesenjangan ekonomi antarwilayah terjadi dalam suatu periode tertentu. Artinya, konvergensi sigma melihat perubahan tingkat dispersi atau variasi pendapatan per kapita antarwilayah dari waktu ke waktu. Sementara itu, konvergensi beta kondisional menekankan bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik struktural yang berbeda, sehingga untuk melihat terjadinya konvergensi perlu melibatkan variabel-variabel penjelas lain. Dalam hal ini seperti kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antarwilayah.

Konvergensi pertumbuhan ekonomi dapat dilihat atau diukur melalui PDRB ADHK per kapita, karena indikator ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil tiap wilayah. Jika wilayah dengan PDRB per kapita rendah mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dibanding wilayah dengan PDRB tinggi, hal ini menunjukkan adanya konvergensi, yaitu kesenjangan ekonomi antar wilayah yang semakin mengecil. Dengan demikian, PDRB ADHK per kapita menjadi alat penting untuk

menganalisis apakah pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah cenderung menyamai atau tetap berbeda. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Manalu *et al.*, (2024) yang menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK dapat digunakan untuk menganalisis konvergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah, dimana dengan menggunakan PDRB per kapita riil, peneliti dapat menilai apakah daerah dengan PDRB rendah tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah dengan PDRB tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB per kapita ADHK tidak hanya menggambarkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, tetapi juga menjadi alat penting untuk menilai kesetaraan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) merupakan ukuran rata-rata *output* riil (setelah disesuaikan inflasi) barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah dibagi jumlah penduduknya. Dalam dokumen Pedoman Praktis Penghitungan PDRB, disebutkan bahwa “pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.” Sementara itu, menurut dokumen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) BPS, “PDRB per kapita ADHK berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita” (BPS DIY, 2009).

Menurut BPS Indonesia, Provinsi dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi ke dua terletak di Provinsi Jawa Timur setelah DKI Jakarta yang menduduki angka tertinggi ke satu dalam 10 tahun terakhir yakni periode tahun 2015-2024. Menurut Sakti & Maudita (2022) menjelaskan bahwa fenomena ini menarik karena meskipun PDRB ADHK meningkat, distribusi pertumbuhan tidak merata antar kabupaten/kota, sehingga perlu dianalisis apakah terjadi konvergensi sigma maupun beta kondisional di tingkat regional.

Tabel 1.1 Data Jumlah PDRB ADHK Menurut 10 Provinsi Tertinggi Indonesia 2020-2024 (Miliar Rupiah)

PROVINSI	2020	2021	2022	2023	2024
DKI Jakarta	1.792.291.09	1.856.000.70	1.953.488.99	2.050.472.97	2.151.041.33
Jawa Timur	1.611.392.55	1.668.754.36	1.757.874.90	1.844.808.68	1.935.810.15
Jawa Barat	1.453.380.72	1.507.746.39	1.589.984.93	1.669.421.49	1.752.071.20
Jawa Tengah	965.227.27	997.321.13	1.050.278.90	1.102.473.58	1.157.025.94
Sumatera Utara	533.746.36	547.651.82	573.528.77	602.235.95	632.534.73
Riau	489.995.75	506.471.91	529.533.98	551.828.49	571.233.59
Kalimantan Timur	472.393.33	484.439.61	506.158.91	537.630.01	570.824.01
Banten	441.148.58	460.952.79	484.129.42	507.425.74	531.735.25
Sulawesi Selatan	328.154.57	343.395.41	360.912.82	377.207.78	396.141.74
Sumatera Selatan	315.129.22	326.405.18	343.503.62	360.967.45	379.119.63

Sumber: BPS Indonesia, data diolah penulis tahun 2025

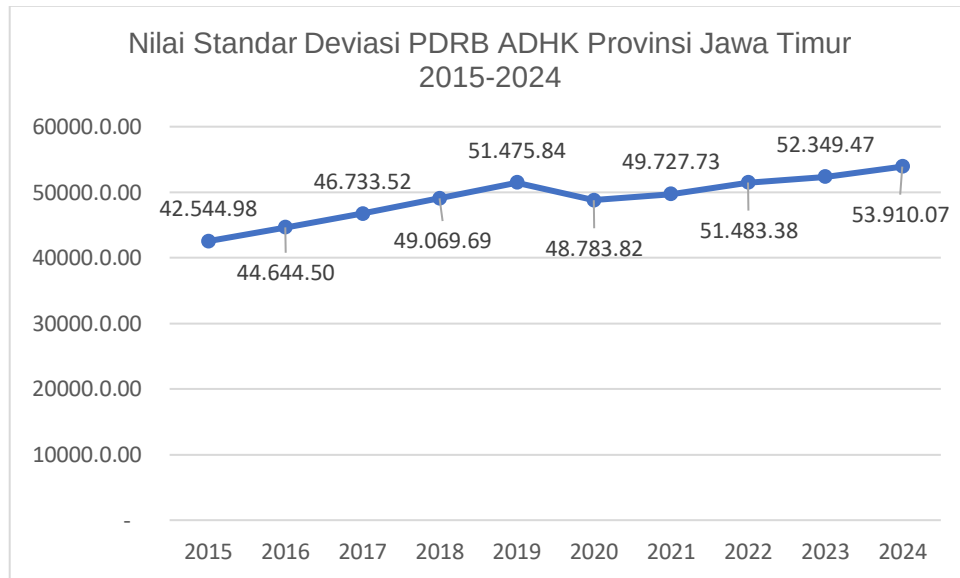
Pada tabel 1.1 diatas ini, merupakan tabel yang menjelaskan kondisi atau tren PDRB ADHK dalam 5 tahun terakhir yakni tahun 2020 sampai dengan 2024. Selama lima tahun terakhir Provinsi DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan nilai PDRB ADHK tertinggi pertama. Dimana, pada tahun 2020 PDRB ADHK Provinsi Jakarta sebesar 1.792.291.09 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 sebesar 1.856.000.70 miliar rupiah, dan pada tahun 2022 sebesar 1.953.488.99 miliar rupiah, kemudian pada tahun 2023 sebesar 2.050.472.97 miliar rupiah, dan terakhir pada tahun 2024 sebesar 2.151.041.33 miliar rupiah. Provinsi Jawa Timur dipilih karena Provinsi tersebut memiliki nilai PDRB ADHK tertinggi kedua di Indonesia. Dimana pada tahun 2020 Provinsi Jawa Timur memiliki nilai PDRB ADHK sebesar 1.611.392.55 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 Provinsi tersebut memiliki nilai sebesar 1.668.754.36 miliar rupiah, lalu pada tahun 2022 nilai PDRB ADHK tersebut sebesar 1.757.874.90 miliar rupiah dan pada tahun 2023 sebesar 1.844.808.68 miliar rupiah, dan sebesar 1.935.810.15 miliar rupiah pada tahun 2024. Sehingga menjadi wilayah yang representatif untuk mempelajari pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini memungkinkan analisis kesenjangan dan dinamika ekonomi antar kabupaten/kota, terutama di provinsi dengan

perekonomian besar dan sektor yang beragam. Dalam kajian konvergensi pertumbuhan ekonomi, provinsi dengan banyak kabupaten/kota, seperti Jawa Timur, dipilih karena variasi ekonomi antar daerah lebih jelas terlihat. Penelitian oleh NUR (2023) menunjukkan bahwa semakin banyak kabupaten yang dianalisis, semakin efektif identifikasi konvergensi sigma dan beta serta faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pendapatan antar daerah. Oleh karena itu walaupun Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan nilai PDRB ADHK tertinggi pertama, namun provinsi tersebut tidak dipilih karena memiliki kabupaten atau kota lebih sedikit dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur.

Dalam dunia statistik, standar deviasi atau simpangan baku merupakan ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh nilai dari data tersebut tersebar atau yang berarti jarak. Seperti penelitian oleh Febriani (2022) yang menjelaskan bahwa nilai standar deviasi digunakan untuk melihat gambaran tentang sebaran data dari yang terkecil hingga terbesar. Dalam penelitian ini, standar deviasi digunakan sebagai ukuran dispersi atau variasi pendapatan per kapita antar wilayah. Dimana, nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antar wilayah, mencerminkan adanya ketimpangan ekonomi yang besar. Sebaliknya, nilai standar deviasi yang rendah mengindikasikan bahwa perbedaan antar wilayah semakin kecil, menandakan adanya proses konvergensi di mana wilayah-wilayah dengan pendapatan rendah tumbuh lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan dari wilayah yang lebih maju.

Oleh karena itu, analisis standar deviasi sangat penting dalam menilai efektivitas kebijakan pembangunan dan memantau proses konvergensi ekonomi di suatu negara atau wilayah serta sebagai data untuk menjelaskan fenomena yang terjadi untuk dianalisis lebih lanjut apakah memang terjadi konvergensi atau

malah divergensi. Berikut ini data PDRB ADHK menurut kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur berdasarkan nilai standar deviasi.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, data diolah penulis tahun 2025

Gambar 1.1 Nilai Standar Deviasi PDRB ADHK (Ribu Rupiah) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2024

Berdasarkan gambar 1.1 diatas ini, terdapat gambar yang menunjukkan nilai standar deviasi berdasarkan data PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2024. Tren nilai standar deviasi PDRB ADHK Provinsi Jawa Timur menunjukkan pola yang berfluktuasi namun secara umum cenderung meningkat dari awal hingga akhir periode. Pada tahun 2015, nilai standar deviasi tercatat sebesar 42.544,98 ribu rupiah, dan pada tahun 2024, nilainya mencapai 53.910,07 ribu rupiah. Peningkatan sebesar kurang lebih 11.365,09 ribu rupiah selama sembilan tahun ini secara garis besar menunjukkan adanya indikasi divergensi pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Jawa Timur. Disparitas ekonomi antarwilayah, yang diukur melalui PDRB ADHK, cenderung membesar selama periode pengamatan. Secara rinci, dari tahun 2015 hingga 2019, terjadi peningkatan yang konsisten dalam standar deviasi, mencapai puncaknya di tahun

2019 sebesar 51.475,84 ribu rupiah. Ini mengisyaratkan bahwa disparitas ekonomi terus melebar dalam periode pra-pandemi tersebut. Tahun 2020 dan 2021 menunjukkan adanya penurunan nilai standar deviasi menjadi 48.783,82 ribu rupiah dan 49.727,73 ribu rupiah, yang mungkin sebagian dipengaruhi oleh guncangan ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang memengaruhi semua wilayah, berpotensi mengurangi sementara disparitas *relatif*. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, tren divergensi kembali terjadi, dengan standar deviasi meningkat tajam dan mencapai nilai tertinggi dalam periode tersebut pada tahun 2024 53.910,07 ribu rupiah. Kesimpulan utamanya adalah bahwa, meskipun terdapat fluktuasi jangka pendek, konvergensi sigma tidak terbentuk karena standar deviasi akhir lebih besar daripada nilai awalnya. Ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan regional di Jawa Timur selama periode 2015–2024 belum berhasil sepenuhnya dalam mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).

Penelitian ini disusun tidak hanya berdasarkan data pertumbuhan ekonomi atau PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), tetapi juga melibatkan data persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB ADHK sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode 2015–2024, dengan menggunakan analisis konsep konvergensi sigma dan konvergensi beta kondisional. Pemilihan ke-empat variabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, dan PDRB ADHK sektor industri karena memiliki hubungan antar variabel dan didasarkan pada keterkaitan yang kuat dalam menjelaskan kondisi pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, dan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dalam IPM serta

dapat dipengaruhi juga oleh struktur ekonomi daerah yang dalam hal ini yakni kontribusi sektor industri. Penurunan kemiskinan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memproduksi dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, kemiskinan tinggi membatasi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi sehingga menghambat pertumbuhan. IPM yang tinggi meningkatkan keterampilan, produktivitas, dan efisiensi masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya dalam konteks pembangunan daerah, peran sektor industri juga menjadi faktor strategis yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sektor industri, khususnya industri pengolahan, mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer, menyerap tenaga kerja, serta mendorong aktivitas ekonomi sektor lainnya. Kontribusi sektor industri yang besar terhadap PDRB mencerminkan struktur ekonomi yang lebih maju dan produktif. Daerah dengan kontribusi sektor industri yang tinggi cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat karena didukung oleh proses produksi yang efisien dan berorientasi pada peningkatan *output*. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas manusia. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Damara *et al.*, (2025) yang menjelaskan bahwa kemiskinan dan IPM merupakan variabel dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh peran sektor industri sebagai penghasil nilai tambah dalam perekonomian. Sektor industri mampu mendorong peningkatan *output* ekonomi melalui aktivitas produksi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prabowo (2025) yang menunjukkan bahwa sektor industri memiliki peran penting

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Fenomena pada penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi antar wilayah berdasarkan PDRB ADHK mengalami pola yang tidak sejalan dengan konsep konvergensi. Konsep konvergensi pertumbuhan ekonomi yaitu wilayah dengan pendapatan per kapita rendah tumbuh lebih cepat sehingga disparitas antar wilayah menurun. Namun, perhitungan standar deviasi PDRB ADHK menunjukkan nilai yang meningkat dari tahun ke tahun, mengindikasikan divergensi ekonomi. Artinya, perbedaan pertumbuhan antar wilayah justru melebar, bertolak belakang dengan harapan konsep konvergensi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan meningkat, distribusinya tidak merata. Beberapa wilayah tetap tertinggal dibandingkan wilayah lain. Fenomena ini penting diteliti untuk memahami faktor-faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi ketimpangan pertumbuhan regional.

Gapnya, berdasarkan hasil perhitungan standar deviasi terhadap data PDRB ADHK antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, terlihat adanya peningkatan nilai standar deviasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini menunjukkan adanya divergensi ekonomi, di mana kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah justru melebar. Hal ini tidak sejalan dengan teori konvergensi pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa seiring waktu, disparitas pendapatan antar wilayah seharusnya menurun. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah benar memang terjadi konvergensi atau divergensi, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pola pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Teori Pertumbuhan Ekonomi, secara umum menjelaskan faktor-faktor yang mendorong peningkatan kapasitas

produksi dan pendapatan suatu wilayah dalam jangka panjang. Seperti Teori Neoklasik (Robert Solow) yang berbunyi pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam jangka panjang didorong oleh tiga faktor utama yaitu akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja (populasi), dan kemajuan teknologi.

Konsep konvergensi pertumbuhan ekonomi berakar atau berasal dari teori pertumbuhan ekonomi Neoklasik oleh Robert Solow, namun dikembangkan oleh Barro dan Sala-i-Martin yang menguji hipotesis konvergensi secara empiris menggunakan data lintas negara dan lintas wilayah. Karya mereka yang berjudul *Convergence* (1992) menjadi landasan bagi banyak penelitian selanjutnya tentang konvergensi beta dan konvergensi sigma. Oleh karena itu penelitian ini disusun untuk mengetahui ada atau tidaknya konvergensi yang ada di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesenjangan PDRB ADHK perkapita semakin mengecil atau melebar pada 10 tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
2. Bagaimana pengaruh PDRB ADHK per kapita tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase tingkat kemiskinan, dan PDRB ADHK sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?
3. Apakah terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi pada 10 tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur?

1.3 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis konvergensi pertumbuhan ekonomi dan faktor yang mempengaruhi terjadinya konvergensi Provinsi Jawa Timur selama

periode 2015–2024, sesuai dengan ketersediaan dan konsistensi data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya mencakup empat indikator utama, yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), persentase penduduk miskin, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan PDRB ADHK sektor industri. Sehingga variabel lain yang berpotensi memengaruhi dinamika pertumbuhan ekonomi tidak dibahas secara mendalam. Metode analisis yang diterapkan terbatas pada pendekatan konvergensi sigma, dan konvergensi beta kondisional dengan menggunakan model estimasi data panel. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan ekonometrika lain seperti model spasial atau panel dinamis. Selain itu, seluruh data yang digunakan merupakan data sekunder resmi dari BPS tanpa melibatkan survei primer. Hasil analisis yang diperoleh difokuskan pada gambaran penyempitan atau pelebaran disparitas ekonomi antarwilayah dalam ruang lingkup Jawa Timur, sehingga temuan penelitian ini tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi pada provinsi atau wilayah lain di Indonesia.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah kesenjangan pendapatan cenderung mengecil atau melebar (konvergensi sigma) pada 10 tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB ADHK per kapita tahun sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), persentase tingkat kemiskinan, dan

kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi 10 tahun terakhir Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk mengetahui apakah wilayah dengan PDRB ADHK perkapita rendah tumbuh lebih cepat di bandingkan wilayah dengan PDRB ADHK perkapita tinggi.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya mengenai konsep konvergensi sigma dalam mengukur kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Jawa Timur dan konvergensi beta dalam melihat hubungan atau pengaruh antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih merata dan efektif dalam mengurangi disparitas antar kabupaten/kota di Jawa Timur.